

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2021

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Mahayu Dyah Pramundita
Nomor Mahasiswa : 19313267
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
2023

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2021

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar
Sarjana jenjang Strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Mahayu Dyah Pramundita
Nomor Mahasiswa : 19313267
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam Tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UIL. Apabila di kemudiah hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Maret 2023

Penulis,



Mahayu Dyah Pramundita

PENGESAHAN

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2021

Nama : Mahayu Dyah Pramundita
Nomor Mahasiswa : 19313267
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 13 Maret 2023

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Dr. Unggul Priyadi, M.Si.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota
di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2017**

Disusun oleh : MAHAYU DYAH PRAMUNDITA

Nomor Mahasiswa 19313267

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 05 April 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Dr. Drs. Unggul Priyadi, M.Si.

Penguji : Prof. Dr. Drs. Nur Feriyanto, M.Si



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

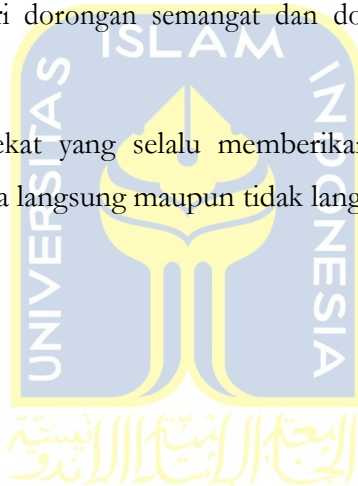
Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. 

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur senantiasa kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridha dan karunia-Nya serta kemudahan dan kelancaran sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk:

1. Orang tua tersayang Bapak dan Ibu atas kasih sayang, perhatian, doa, semangat, dan segalanya berupa moril maupun materil yang tanpa henti diberikan untuk peneliti sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakakku Mahayu Rizka Novita, Mahayu Okta Irlanda, dan Mahendra CakraSuraswara yang selalu memberi dorongan semangat dan doa sehingga dapat menyelesaikan laporan skripsi ini.
3. Teman-teman terdekat yang selalu memberikan masukan dan bantuan serta semangat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatub

Alhamdulillah, Puji dan Syukur atas rahmat dan karunia yang diberikan Allah hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pengaruh Upah minimum, Indeks Pembangunan Manusia(IPM), Jumlah Penduduk danPertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2016 – 2021.

Skripsi ini tersusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu peneliti terbuka menerima kritik dan saran yang dapat membangun. Penyusun skripsi ini tidak terlepas dari berbagai bantuan, bimbingan dan arahan dari banyak pihak.,oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah S.W.T yang senantiasa memberikan rahmat, perlindungan, kekuatan, kesabaran serta jalan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Yth. Bapak Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Yth. Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D. selaku Kepala Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Yth. Bapak Dr. Unggul Priyadi, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yangtelah memberikan masukan, saran serta senantiasa membimbing sehingga dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik.
5. Yth. Bapak Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan pendampingan selama menenpuh kuliah hingga mampu menyelesaikan laporan ini.
6. Orang tua tercinta Bapak Aris Banindro dan Ibu Mekar Hayuningsih atas usaha, doa dan dukungan yang telah diberikan yang tak mungkin terbalaskan.

7. Mahayu Rizka Novita, Mahayu Okta Irlanda, dan Mahendra CakraSuraswara (kakak-kakakku) yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan–rekan seperjuangan yang mengerjakan skripsi yang memberikan *support* tanpa henti untuk mengerjakan skripsi ini.
9. Kakak tingkat satu jurusan yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman–teman terdekat saya yang saling berbagi dalam suka dan duka.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Tentunya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu peneliti terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun dan dapat dijadikan masukan agar penelitian ini dapat menjadi lebih baik lagi. Akhir katasaya ucapkan terimakasih.



Yogyakarta, 13 Maret 2023

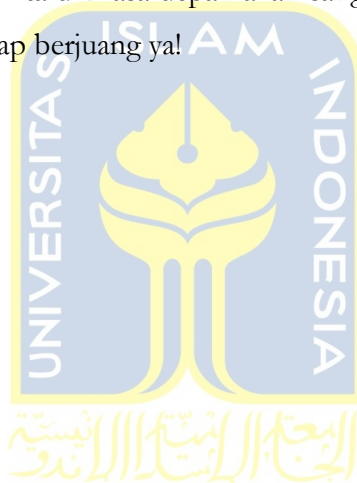
Mahayu Dyah Pramundita

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (Qs. Al-Baqarah ayat 286)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” (Qs. Al-Insyirah ayat 5-6)

Orang lain nggak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun nggak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap berjuang ya!



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	iii
PENGESAHAN UJIAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTTO.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Kajian Pustaka.....	7
2.2 Landasan Teori.....	13
2.2.1 Kemiskinan.....	13
2.2.2 Upah Minimum Kabupaten/Kota.....	14
2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia.....	15

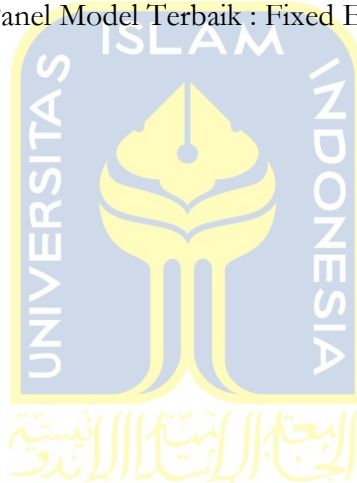
2.2.4	Pendapatan Asli Daerah	16
2.2.5	Jumlah Penduduk.....	17
2.3	Hubungan Antara Variabel Dependen Dan Independen	18
2.3.1	Hubungan Antara Kemiskinan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota	18
2.3.2	Hubungan Antara Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia 18	
2.3.3	Hubungan Antara Kemiskinan dengan Pendapatan Asli Daerah	19
2.3.4	Hubungan Antara Kemiskinan dengan Jumlah Penduduk	19
2.4	Kerangka Pemikiran.....	20
2.5	Hipotesis Penelitian	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		22
3.1	Jenis dan Sumber Data.....	22
3.2	Definisi Operasional Variabel.....	22
3.2.1	Variabel Dependen.....	22
3.2.2	Variabel Independen	23
3.3	Metode Analisis	23
3.3.1	Common Effect Model (CEM).....	24
3.3.2	Fixed Effect Model (FEM)	24
3.3.3	Random Effect Model (REM).....	24
3.4	Penentuan Metode Estimasi Regresi Data Panel.....	24
3.4.1	Uji Chow	25
3.4.2	Uji Hausman.....	25
3.4.3	Uji LM.....	25
3.5	Pengujian Hipotesis	26
3.5.1	Koefisien Determinasi (R^2)	26

3.5.2	Koefisien Regresi Bersama (Uji F).....	26
3.5.3	Koefisien Regresi Parsial (Uji T).....	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		28
4.1	Deskripsi Data Penelitian	28
4.2	Hasil Analisis dan Pembahasan	29
4.2.1	Common Effect Model	29
4.2.2	Fixed Effect Model.....	30
4.2.3	Random Effect Model	30
4.3	Pemilihan Model Terbaik.....	31
4.3.1	Uji Chow	31
4.3.2	Uji Hausman.....	32
4.4	Interpretasi Model Terbaik.....	32
4.4.1	Uji Keباكان Regresi (R^2).....	33
4.4.2	Uji Kelayakan Model (Uji F).....	33
4.4.3	Uji statistik (Uji t).....	33
4.5	Pembahasan.....	34
4.5.1	Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Tingkat Kemiskinan	34
4.5.2	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan	35
4.5.3	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan	35
4.5.4	Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan	35
BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI		37
5.1	Simpulan	37
5.2	Implikasi.....	38
DAFTAR PUSTAKA.....		39



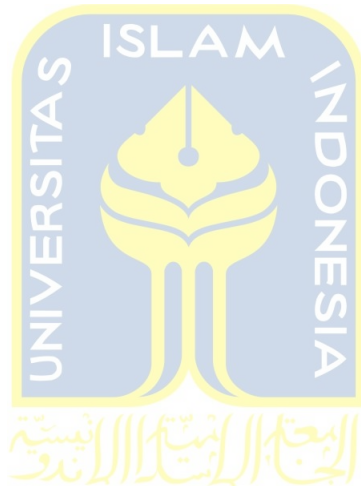
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif.....	28
Tabel 4.2 Hasil Estimasi Common Effect Model	29
Tabel 4.3 Hasil Estimasi Fixed Effect Model	30
Tabel 4.4 Hasil Estimasi Random Effect Model	31
Tabel 4.5 Hasil Uji Chow.....	32
Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman	32
Tabel 4.7 Regresi Data Panel Model Terbaik : Fixed Effect Model.....	32



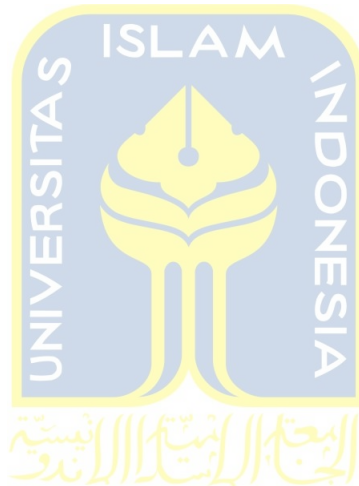
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Indonesia dan Provinsi DIY.....	1
Gambar 1.2 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa	2
Gambar 1.3 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi DIY	2
Gambar 2.1 Gambar Teori Lingkaran Setan Kemiskinan	14
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Tingkat Kemiskinan.....	20



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Tingkat Kemiskinan, Upah Minimum, IPM, PAD, dan Jumlah Penduduk.....	42
Lampiran 2 Common Effect Model.....	43
Lampiran 3 Fixed Effect Model.....	44
Lampiran 4 Random Effect Model.....	45
Lampiran 5 Chow Test.....	46
Lampiran 6 Hausman Test.....	47



ABSTRAK

Kemiskinan menjadi masalah yang cukup rumit. Keadaan ini disebut di mana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, papan, obat-obatan, dan tempat tinggal. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rentang tahun antara 2016-2021. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan analisis regresi data panel yang merupakan kombinasi antara data *cross section* dengan *time series* yang kemudian diolah menggunakan *evIEWS 12*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata Kunci: UMK, IPM, PAD, Jumlah Penduduk

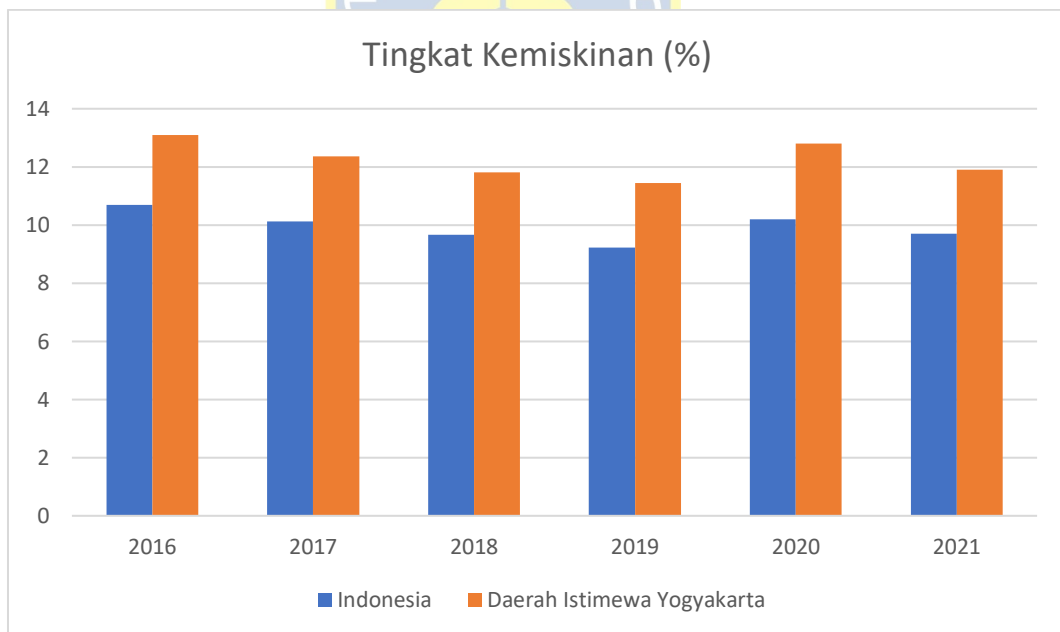
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

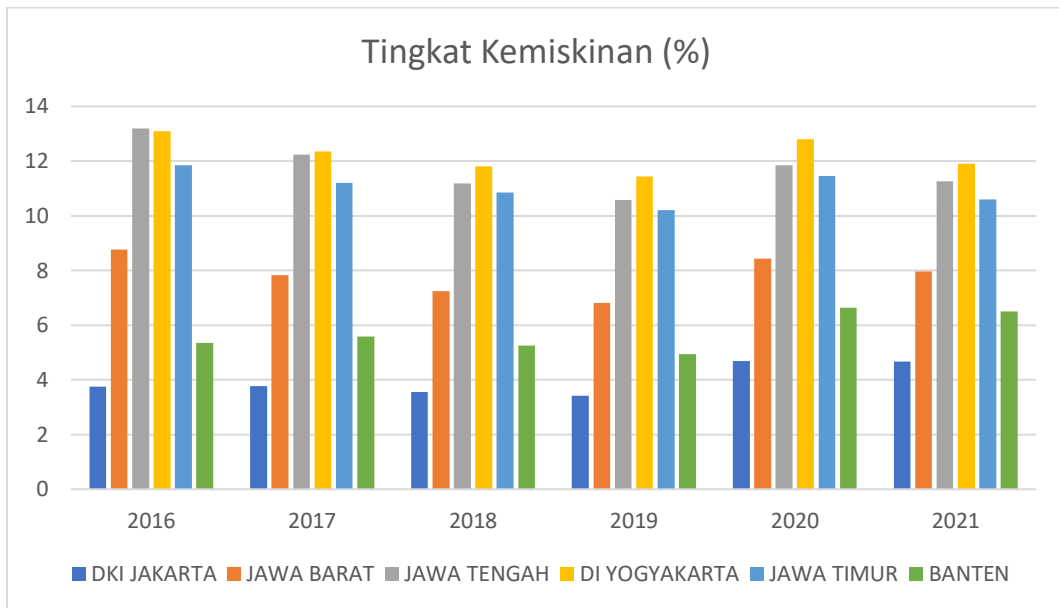
Kemiskinan menjadi permasalahan utama bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, papan, obat-obatan, dan tempat tinggal. (Hardinandar dalam Priseptian & Primandhana, 2022)

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan provinsi kecil yang terletak di Pulau Jawa, Indonesia. Meskipun ukurannya kecil, provinsi ini memiliki sejarah dan budaya yang kaya serta menjadi pusat pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata di Indonesia. Namun, provinsi ini juga dihadapkan pada masalah kemiskinan yang signifikan.



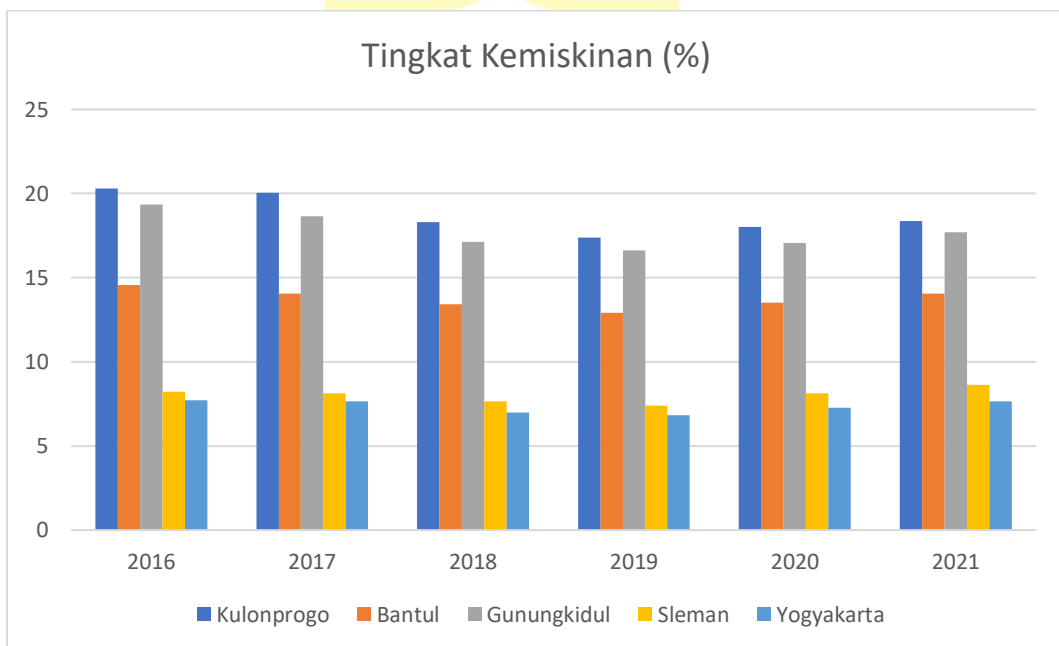
Gambar 1.1 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Indonesia dan Provinsi DIY

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, pada kurun waktu 2016-2021 tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional. Penyebabnya yaitu penyaluran bantuan pemerintah masih banyak yang tidak tepat sasaran. Hal ini kemudian menjadi akibat lambatnya penurunan kemiskinan. (Salsabilla et al., 2022)



Gambar 1.2 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa

Gambar 1.2 menunjukkan perbandingan tingkat kemiskinan pada 6 provinsi di Pulau Jawa pada kurun waktu 2016-2021. Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 yaitu sebesar 13,19% sedangkan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 13,1%. Kemudian pada tahun 2017-2021 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki tingkat kemiskinan paling tinggi di Pulau Jawa.



Gambar 1.3 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi DIY

Berdasarkan Gambar 1.3, tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2016 yaitu sebesar 20,3%. Dalam kurun waktu 2016-2021 tiga daerah tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Bantul. Tingkat kemiskinan ketiga daerah tersebut pada tahun 2017-2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016, kemudian pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan.

Tingkat kemiskinan terendah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di Kota Yogyakarta pada tahun 2019 yaitu sebesar 6,84%. Dalam kurun waktu 2016-2021 dua daerah tingkat kemiskinan terendah berada di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Tingkat kemiskinan kedua daerah tersebut pada tahun 2017-2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016, kemudian pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan.

Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan yang cukup ekstrem karena adanya pandemi COVID-19. Penyebab dari hal tersebut adalah adanya PHK yang terjadi selama pandemi COVID-19 dan banyaknya orang tua yang meninggalkan anak-anaknya karena meninggal dunia akibat terparap COVID-19. (Madina, 2022)

Kemiskinan dapat disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang kurang baik, yang tercermin dari indeks pembangunan manusia (IPM) yang terdiri dari tiga dimensi: kesehatan, pendidikan, dan daya beli. IPM dapat dijadikan indikator pembangunan yang berkorelasi negatif dengan kondisi kemiskinan di suatu daerah. Semakin tinggi IPM di suatu daerah, semakin baik kualitas hidup masyarakat dan semakin rendah angka kemiskinan. (Fahrika dkk dalam Salsabilla et al., 2022)

Permasalahan yang sering terjadi adalah jumlah penduduk yang meningkat secara tidak terkendali, yang dapat menyebabkan peningkatan angka kemiskinan. Jumlah penduduk dalam suatu daerah bisa mengalami perubahan akibat dari faktor-faktor seperti lahirnya anak, meninggalnya warga, penuaan penduduk, dan perpindahan warga ke daerah lain. Selain itu, faktor-faktor seperti ukuran penduduk, struktur penduduk, dan pola distribusi penduduk juga dapat berdampak pada perubahan jumlah penduduk di suatu daerah.. Teori Malthus menjelaskan bahwa ketersediaan sumber daya alam semakin terbatas dalam memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat karena manusia memiliki kebutuhan yang tak terbatas. Kondisi tersebut

dapat menyebabkan manusia semakin dekat dengan garis kemiskinan. (Agustina dkk dalam Cahyani & Muljaningsih, 2022)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah jenis penerimaan daerah yang berasal dari pengembangan potensi daerah sendiri dan dipungut sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku di daerah tersebut. Ukuran kemandirian daerah dilihat dari PAD, tinggi rendahnya penerimaan yang diperoleh daerah maka berpengaruh juga peran PAD dalam struktur keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerahnya juga tinggi. (Amami & Asmara, 2022)

Menurut Agustina (dalam Salsabilla et al., 2022), Salah satu faktor lain yang berkontribusi terhadap kemiskinan adalah upah. Pendapatan penduduk akan mencapai puncaknya ketika penggunaan tenaga kerja penuh dicapai melalui upah minimum yang dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja. Untuk mengatasi kemiskinan, Pemerintah DIY telah melakukan berbagai solusi, di antaranya adalah peningkatan pendapatan. Hal ini tercermin dalam peningkatan yang signifikan pada upah minimum di DIY.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka diambil penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh secara simultan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh secara parsial Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Bagaimana pengaruh secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

5. Bagaimana pengaruh secara parsial jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengambil kebijakan dalam mengidentifikasi kebijakan yang tepat untuk menanggulangi kemiskinan khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan pada umumnya di Indonesia sehingga strategi-strategi yang dibuat oleh pemerintah bisa berjalan dengan baik dalam menanggulangi kemiskinan.
2. Memberi informasi yang dapat dijadikan acuan atau rujukan bagi penelitian lain untuk menambah pengetahuan peneliti dalam menanggulangi kemiskinan.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Bab ini menyajikan kajian pustaka yang berisi pengkajian dari hasil penelitian sebelumnya, landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian

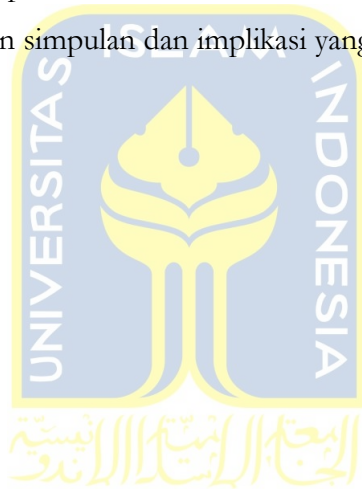
Bab ini terdapat jenis dan cara pengumpulan data, definisi variabel operasional, dan metode analisis.

BAB IV Hasil Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini memaparkan deskripsi data penelitian, hasil analisis dan pembahasan.

BAB V Simpulan dan Implikasi

Pada bab ini menyajikan simpulan dan implikasi yang diambil peneliti dari penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya dengan topik yang sama sebagai sumber referensi dalam penelitian. Beberapa referensi dari studi sebelumnya yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

Salsabilla et al., (2022) melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor kemiskinan di kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun teknik analisis yang digunakan yaitu regresi data panel. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa variabel jumlah penduduk, upah minimum, penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh terhadap kemiskinan sedangkan variabel indeks pembangunan manusia tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Priseptian & Primandhana (2022) melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan Provinsi Jawa Timur tahun 2005- 2020. Adapun teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dengan model Ordinary Least Square (OLS). Hasil dari penelitian menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan seluruh variabel bebas memengaruhi kemiskinan secara simultan di Jawa Timur.

Rany (2021) melakukan penelitian tentang pengaruh PAD, DAU, dan belanja modal terhadap kemiskinan (studi kasus 38 kab/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2010 – 2019). Adapun teknik analisis yang digunakan yaitu regresi data panel. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh langsung negatif terhadap kemiskinan, namun pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Kadafi & Murtala (2020) melakukan penelitian mengenai PAD (pengaruh pendapatan asli daerah), DAU (dana alokasi umum) dan dana otonomi khusus terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2010-2017. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis regresi data panel. Hasil dari penelitian menyatakan

bahwa dana alokasi umum signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh sedangkan pendapatan asli daerah dan dana otonomi khusus tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

Wahyu Azizah E et al., (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh pendidikan, pendapatan perkapita dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur, begitu pula dengan pendapatan perkapita yang juga memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Selain itu, jumlah penduduk juga memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur.

Sayifullah & Gandasari (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis regresi data panel. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa variabel indeks pembangunan manusia mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan di Provinsi Banten, sedangkan variabel pengangguran menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Banten.

Chairunnisa & Qintharah (2022) melakukan penelitian tentang pengaruh kesehatan, tingkat pendidikan, dan upah minimum terhadap kemiskinan pada Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2020. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor kesehatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan faktor pendidikan memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Selain itu, faktor upah minimum kota/kabupaten juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan.

Berdasarkan berbagai kajian penelitian terdahulu tersebut, berikut disajikan ilustrasi secara singkat dalam Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Keterangan (Judul, Nama, Metode Penelitian)	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Analisis Faktor-Faktor Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Ayu Salsabilla, Indri Arrafi Juliannisa, Nunuk dan Triwahyuningtyas (2022) Metode Penelitian : regresi data panel.	Variabel jumlah penduduk, upah minimum, penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap kemiskinan sedangkan variabel indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Daerah penellitian sama yaitu provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, metode peneitian data panel dan variabel independen yang sama yaitu jumlah penduduk, upah minimum dan indeks pembangunan manusia	Variable independen yang beda yaitu penyerapan tenaga kerja.
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2005- 2020. Laga Priseptian dan Wiwin Priana Primandhana (2015)	Upah minimum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan	Variabel independen yang sama yaitu indeks pembangunan manusia.	Daerah penelitiannya berbeda, metode penelitian berbeda yaitu regresi linier berganda dengan model Ordinary Least Square (OLS), dan

Metode Penelitian : regresi linier berganda dengan model Ordinary Least Square (OLS).	terhadap kemiskinan, pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan seluruh variabel bebas memengaruhi kemiskinan secara simultan di Jawa Timur.		variabel independen yang berbeda antara lain upah minimum provinsi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran.
Pengaruh PAD, DAU, dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus 38 Kab/Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode 2010 – 2019). Alya Prastika Rany (2021). Metode Penelitian : regresi data panel.	Dana Alokasi Umum berpengaruh langsung negatif terhadap Kemiskinan, namun Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Kemiskinan.	Metode penelitian sama yaitu regresi data panel dan variabel independen yang sama adalah Pendapatan Asli Daerah.	Daerah penelitian berbeda, dan variabel independen yang berbeda yaitu DAU dan belanja modal.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh Periode 2010-2017.	Dana alokasi umum signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh sedangkan pendapatan asli daerah dan dana otonomi khusus tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.	Metode penelitian sama yaitu regresi data panel dan variabel independen yang sama adalah Pendapatan Asli Daerah.	Daerah penelitian berbeda, dan variabel independen yang berbeda yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus.

Muhammad Kadafi dan Murtala (2020) Metode Penelitian : regresi data panel.			
Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Elda Wahyu Azizah, Sudarti Dan Hendra Kusuma (2018) Metode Penelitian : regresi data panel.	Pendidikan memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur, begitu pula dengan pendapatan perkapita yang juga memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Selain itu, jumlah penduduk juga memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur.	Metode penelitian sama yaitu regresi data panel dan variabel independen yang sama adalah jumlah penduduk.	Daerah penelitian berbeda, dan variabel independen yang berbeda yaitu pendidikan dan pendapatan per kapita.
Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten.	Variabel indeks pembangunan manusia mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan di Provinsi Banten, sedangkan variabel	Metode penelitian sama yaitu regresi data panel dan variabel independen yang sama adalah	Daerah penelitian berbeda, dan variabel independen yang berbeda yaitu pengangguran.

<p>Sayifullah & Tia Ratu Gandasari (2016)</p> <p>Metode Penelitian : regresi data panel.</p>	<p>pengangguran menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Banten.</p>	<p>indeks pembangunan manusia.</p>	
<p>Pengaruh Kesehatan, Tingkat Pendidikan, dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020.</p> <p>Nurlaila Maysaroh Chairunnisa & Yuha Nadhirah Qintharah (2022)</p> <p>Metode Penelitian : regresi berganda.</p>	<p>Faktor kesehatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan faktor pendidikan memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Selain itu, faktor upah minimum kota/kabupaten juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan.</p>	<p>Variabel independen yang sama adalah upah minimum kabupaten/kota.</p>	<p>Daerah penelitian berbeda, metode penelitian berbeda yaitu regresi berganda dan variabel independen yang berbeda yaitu kesehatan dan tingkat pendidikan.</p>

Dari hasil penelitian kajian pustaka terdahulu, menunjukkan beberapa variabel-variabel penting dan berpengaruh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel upah minimum kabupaten/kota, indeks pembangunan manusia, pendapatan asli daerah, dan jumlah penduduk memiliki pengaruh penting terhadap tingkat kemiskinan dan penulis akan menggunakan variabel tersebut untuk melihat seberapa besar pengaruhnya di kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016-2021.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kemiskinan

Menurut (Daniel et al., 2021) Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, sedangkan lingkungan yang kurang mendukung tidak memberikan kesempatan yang cukup bagi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan atau keluar dari kerentanan tersebut. Pada dasarnya definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang terkait dengan perkiraan tangga pendapatan dan kebutuhan yang dibatasi hanya pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup dengan layak. Menurut definisi Bank Dunia, kemiskinan absolut merujuk pada kondisi hidup dengan pendapatan kurang dari USD \$1 per hari, sedangkan kemiskinan moderat merujuk pada kondisi hidup dengan pendapatan kurang dari USD \$2 per hari.

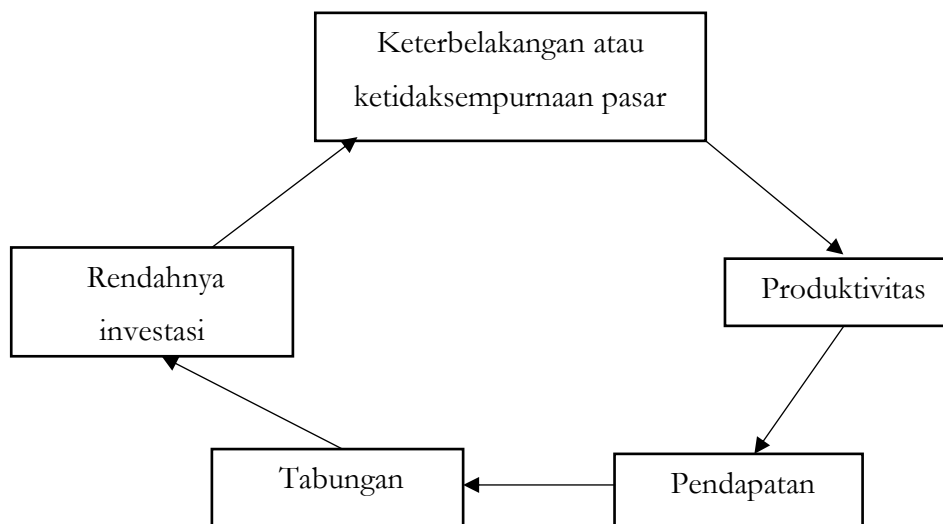
2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada seseorang yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum namun masih memiliki pendapatan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat di sekitarnya.

Menurut unggahan BPS, terdapat sejumlah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Beberapa indikator tersebut antara lain adalah:

1. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index P1), sebagai pengukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masyarakat pada garis kemiskinan. Nilai indeks yang tinggi diartikan bahwa pengeluaran rata-rata masyarakat jauh dari garis kemiskinan.

2. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index P2), sebagai gambaran tentang sebaran pengeluaran antara masyarakat miskin. Nilai indeks yang tinggi diartikan bahwa ketimpangan juga tinggi.
3. Head Count Index, yang dimaknai sebagai besaran persentase masyarakat dibawah garis kemiskinan.



Gambar 2.1 Gambar Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Nurkse (dalam Nurjihadi & Dharmawan, 2016) menjelaskan tentang fenomena lingkaran setan kemiskinan yang menjerat masyarakat miskin di negara-negara miskin. Lemahnya tingkat pendapatan riil menyebabkan rendahnya kemampuan menabung dan lemahnya kapasitas modal untuk investasi yang berdampak pada rendahnya produktivitas dan akhirnya menyebabkan lemahnya tingkat pendapatan. Proses melingkar itu menyebabkan masyarakat miskin sulit keluar dari kemiskinannya jika tidak ada intervensi dari luar. Proses ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.

2.2.2 Upah Minimum Kabupaten/Kota

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 yang membahas tentang upah minimum, terdapat dua macam upah minimum:

- a. Upah Minimum Provinsi (UMP) merujuk pada besaran upah atau gaji terendah yang harus diberikan oleh perusahaan kepada pekerjanya di suatu provinsi.

- b. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merujuk pada besaran upah atau gaji terendah yang harus diberikan oleh perusahaan kepada pekerjanya dalam suatu kabupaten/kota.

Menurut (Lestari et al., 2022) Upah adalah imbalan atau penghargaan atas kinerja yang layak dan harus mencukupi kebutuhan hidup bersama keluarga agar pekerja dapat fokus pada tugas yang diberikan kepadanya. Upah menjadi faktor utama yang dapat meningkatkan motivasi kerja dan berdampak pada peningkatan produktivitas perusahaan.

Penetapan upah minimum di suatu daerah atau kota sangat tergantung pada perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Meskipun pembahasannya diusulkan oleh bupati atau walikota, penetapan upah minimum dilakukan oleh gubernur. Secara umum, upah memiliki posisi strategis bagi pekerja, karena upah diperlukan untuk membiayai hidup mereka dan keluarganya, serta sebagai motivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja.

Penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan upah pekerja yang masih mendapatkan upah di bawah standar minimum dan melindungi mereka dari pengusaha yang memberikan upah yang tidak layak. Salah satu faktor yang memengaruhi penetapan upah minimum adalah tingkat inflasi di masing-masing provinsi.

2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP (1990) pembangunan manusia merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk memperluas pilihan-pilihan yang tersedia bagi penduduk. Proses ini dapat dianggap sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas hidup serta sebagai standar dasar yang harus dicapai dalam upaya pembangunan. Konsep pembangunan manusia dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan, dan keterampilan. Terdapat empat hal penting yang harus diperhatikan dalam mencapai tujuan pembangunan, yaitu pemerataan, kesinambungan, partisipasi, dan pemberdayaan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia di suatu wilayah. IPM juga dijadikan faktor penentu dalam pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU). (Badan Pusat Statistik, 2022)

Badan Pusat Statistik (2022) menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai ukuran untuk menilai pencapaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang, kesehatan, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan menggunakan angka harapan hidup, untuk dimensi pendidikan menggunakan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan kemampuan daya beli digunakan sebagai alat ukur untuk dimensi kehidupan yang layak. Untuk menilai pencapaian pembangunan hidup layak menggunakan besaran rata-rata pengeluaran perkapita. Pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah dalam periode tertentu diklasifikasikan menjadi empat kategori untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah tersebut dalam kelompok yang sama. Klasifikasi tersebut meliputi wilayah dengan indeks pembangunan manusia kurang dari 60 masuk ke dalam kategori rendah, wilayah dengan indeks pembangunan manusia antara 60 hingga 70 masuk ke dalam kategori sedang, wilayah dengan indeks pembangunan manusia antara 70 hingga 80 masuk ke dalam kategori tinggi, dan wilayah dengan indeks pembangunan manusia sangat tinggi.

2.2.4 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber di dalam wilayah daerah itu sendiri, yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Sumber pendapatan utama dari PAD adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Tujuan dari PAD adalah untuk memberikan kemandirian keuangan pada daerah, sehingga daerah dapat menggali pendanaan secara mandiri dan lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangannya, sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah perlu memperhatikan sumber-sumber pendapatan alternatif yang dapat dihasilkan, serta menjaga agar PAD tidak merugikan masyarakat atau mengurangi keadilan sosial. (Badrudin dalam Kawulur et al., 2019)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk pada sumber keuangan yang dihasilkan oleh suatu wilayah daerah, yang terdiri dari

pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan berbagai jenis pendapatan asli daerah lain yang sah.. Untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembangunan, mereka harus lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Oleh karena itu, pendapatan asli daerah dan belanja daerah saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran untuk mempercepat roda pemerintahan. Seperti negara pada umumnya, setiap daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melakukan pembangunan di semua bidang. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kewajiban kontribusi yang harus dibayar oleh individu atau badan kepada daerah, yang dikenakan secara paksa sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pendapatan pajak daerah digunakan untuk memenuhi keperluan daerah dan memperbesar kemakmuran rakyat.

2. Retribusi daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi daerah, yang merupakan pungutan daerah yang harus dibayar sebagai pembayaran untuk penggunaan, jasa, pekerjaan, atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang membutuhkan jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.2.5 Jumlah Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap (Badan Pusat Statistik, 2020). Kaum Klasik pada umumnya melihat penduduk sebagai penghambat pembangunan, terutama apabila jumlah penduduknya banyak dan mengalami pertumbuhan yang tinggi. Oleh karena itu, kaum Klasik menganggap bahwa penduduk merupakan beban bagi pembangunan.

Dalam perkembangan saat ini, masalah jumlah penduduk bukanlah sekedar masalah berapa jumlahnya saja, namun juga menyangkut kepentingan pembangunan

dan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Dalam sektor pembangunan, terdapat dua pandangan terkait peran penduduk. Terdapat pandangan yang berbeda mengenai peran penduduk dalam pembangunan. Beberapa orang berpendapat bahwa penduduk dapat menjadi penghambat bagi pembangunan karena jumlah populasi yang besar dengan pendapatan tinggi dianggap dapat memberikan beban pada upaya pembangunan. Namun, di sisi lain, ada juga pandangan yang berpendapat bahwa penduduk dapat menjadi pemicu dalam upaya pembangunan karena jumlah populasi yang besar dapat meningkatkan permintaan terhadap berbagai macam barang dan jasa, dan ini dapat merangsang kegiatan ekonomi di seluruh sektor. (Dumairy dalam Pratiwi, 2022)

2.3 Hubungan Antara Variabel Dependen Dan Independen

2.3.1 Hubungan Antara Kemiskinan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota

Penetapan upah minimum memiliki tujuan untuk mencukupi standar hidup minimum yaitu kesehatan, efisiensi dan kesejahteraan kerja. Upah minimum berguna untuk mengangkat derajat masyarakat yang pendapatannya rendah. Semakin meningkat tingkat upah minimum, maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan. (Kurniawan, 2018)

2.3.2 Hubungan Antara Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia

Investasi pada pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia akan berdampak positif pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini terbukti dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang setelah mendapat pendidikan yang lebih tinggi. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi juga dapat meningkatkan produktivitas seseorang, sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan dengan adanya tenaga kerja yang produktif dan efektif. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan ekonomi di suatu daerah, IPM menjadi salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah.

Fungsi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indikator pembangunan manusia lainnya sangat penting dalam perencanaan dan pembangunan yang terarah. IPM harus berkorelasi positif dengan tingkat kemiskinan di suatu wilayah, karena wilayah dengan IPM yang tinggi diharapkan memiliki kualitas hidup masyarakat yang juga tinggi. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai IPM di suatu wilayah, maka semestinya tingkat kemiskinan masyarakat di wilayah tersebut semakin rendah. IPM menjadi kunci penting dalam mengukur kualitas pembangunan suatu wilayah, dan harus digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (Sayifullah & Gandasari, 2016)

2.3.3 Hubungan Antara Kemiskinan dengan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan sebagai sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah, yang dapat dihasilkan dari berbagai sumber pendapatan seperti pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, serta sumber pendapatan daerah lainnya yang sah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan tujuan mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat membuka peluang bagi sektor-sektor di wilayah setempat untuk berkembang lebih jauh, sehingga dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, wilayah tersebut dapat mengurangi angka pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut. (Manek & Badrudin, 2017)

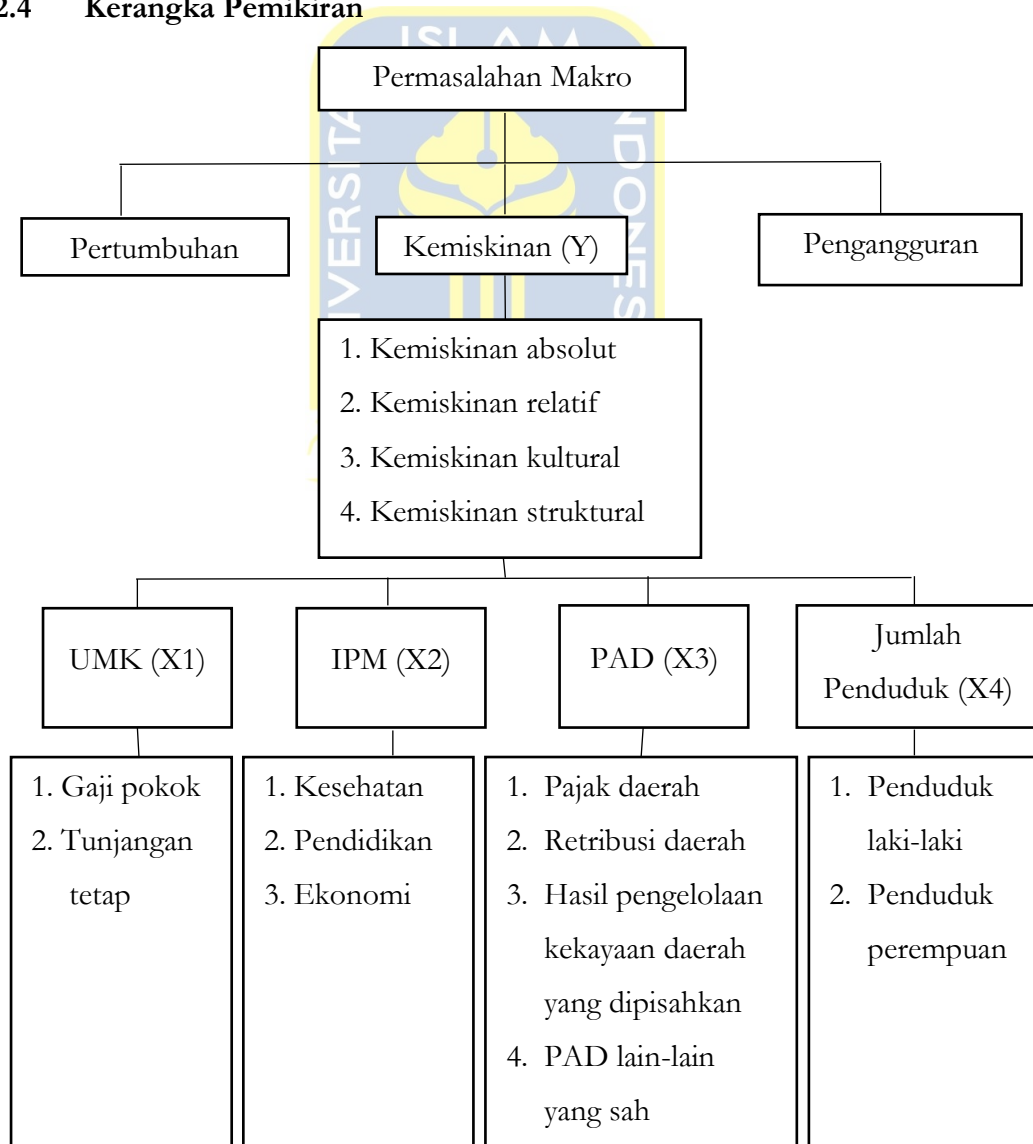
2.3.4 Hubungan Antara Kemiskinan dengan Jumlah Penduduk

.Menurut Todaro (2011) Jumlah populasi yang besar dapat memicu permintaan untuk berbagai barang dan jasa, yang memacu aktivitas ekonomi dan menguntungkan semua orang pada akhirnya. Selain menurunkan biaya produksi, hal ini juga menciptakan pasokan tenaga kerja dalam jumlah yang memadai dan dengan biaya yang terjangkau, sehingga dapat mendorong peningkatan output atau produksi agregat. Dalam hasilnya, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan diiringi dengan menurunnya tingkat kemiskinan.

Menurut Sukirno (Suhandi et al., 2018), perkembangan jumlah penduduk dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Faktor pendorong ini disebabkan oleh adanya potensi tenaga kerja yang lebih banyak, serta adanya peluang untuk memperluas pasar. Perluasan pasar sendiri dipengaruhi oleh dua faktor penting, yaitu jumlah pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk.

Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam suatu negara. Bahkan, para ahli ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith memandang jumlah penduduk sebagai input potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi perusahaan atau rumah tangga. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan.

2.4 Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran pada penelitian ini yang ditunjukkan Gambar 2.2 adalah bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh empat variabel pembangunan ekonomi, antara lain upah minimum kabupaten/kota, indeks pembangunan manusia, pendapatan asli daerah, dan jumlah penduduk. Upah minimum terdiri dari 2 komponen yaitu gaji pokok dan tunjangan tetap. Komponen IPM antara lain yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Komponen PAD di antaranya adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk terdiri dari penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.

2.5 Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara simultan diduga Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.
2. Secara parsial diduga Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.
3. Secara parsial diduga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.
4. Secara parsial diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.
5. Secara parsial diduga jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder ialah data yang tidak langsung didapat tetapi melalui pihak ketiga. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Adapun data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data time series dalam kurun waktu 6 tahun dari tahun 2016-2021, sedangkan untuk data cross section terdiri dari 5 kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan peneliti yaitu:

1. Data tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021
2. Data Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021
3. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021
4. Data Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Daerah (PAD) Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021
5. Data jumlah penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021

3.2 Definisi Operasional Variabel

Adapun variabel operasional yang digunakan pada penelitian ini untuk memperjelas variabel-variabel sebagai berikut:

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi akibat atau variabel yang dipengaruhi karena variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tingkat kemiskinan.

3.2.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab atau variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Adapun variabel independen dalam penelitian ini yaitu:

1. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Dalam penelitian ini mengambil data dari BPS tahun 2016-2021, menggunakan data upah minimum kabupaten/kota dengan satuan rupiah.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam penelitian ini mengambil data dari BPS tahun 2016-2021, menggunakan data indeks pembangunan manusia.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam penelitian ini mengambil data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tahun 2016-2021, menggunakan data pendapatan asli daerah dengan satuan miliar rupiah.

4. Jumlah penduduk

Dalam penelitian ini mengambil data dari BPS tahun 2016-2021, menggunakan data proyeksi jumlah penduduk dengan satuan jiwa.

3.3 Metode Analisis

Adapun metode analisis dalam penelitian ini yaitu regresi data panel. Data panel merupakan data gabungan antara time series dan cross section. Alat yang dipakai untuk mengolah data penelitian yaitu Eviews 12. Adapun cross section yaitu kabupaten/kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut Widarjono (2016), data panel memiliki keuntungan jika dibandingkan dengan data cross section atau time series. Data panel menyajikan data yang lebih banyak sehingga *degree of freedom* yang dihasilkan lebih besar. Hal ini dikarenakan gabungan antara data time series dan cross section dapat mengatasi masalah yang muncul ketika variabel dihilangkan. Model yang digunakan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e$$

Keterangan:

Y : Tingkat Kemiskinan (%)

X₁ : Upah Minimum Kabupaten/Kota (rupiah)

X_2	: Indeks Pembangunan Manusia
X_3	: Pendapatan Asli Daerah (miliar rupiah)
X_4	: Jumlah Penduduk (jiwa)
β_0	: Intersep
$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$: Koefisien regresi variabel independen
e	: komponen error

Menurut Widarjono (2013), metode panel mempunyai tiga model pendekatan :

3.3.1 Common Effect Model (CEM)

Common Effect Model (CEM) merupakan model yang paling sederhana. Metode ini dikatakan sederhana karena hanya menggabungkan data time series dan cross section. Metode yang digunakan untuk mengestimasi model yaitu Ordinary Least Square (OLS). Adapun intersep pada masing-masing koefisien sama dalam model. Tidak hanya itu, slope koefisien dalam data cross section dan time series juga sama.

3.3.2 Fixed Effect Model (FEM)

Fixed Effect Model (FEM) merupakan suatu model regresi data panel yang memperoleh intersep yang berbeda-beda pada setiap unit cross section. Akan tetapi slope koefisien masih sama. Estimasi model yang digunakan yaitu Least Square Dummy Variabel. Adapun model fixed effect sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \alpha_1 D_1 + \dots + \alpha_{26} D_{26} + \epsilon_{it}$$

3.3.3 Random Effect Model (REM)

Random Effect Model (REM) merupakan model yang dapat mengurangi degree of freedom sehingga mengurangi efisien dari parameter yang di estimasi. Dalam model ini terdapat perbedaan intersep. Keuntungan dari model ini yaitu dapat menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini disebut juga dengan Error Component Model (ECM). Adapun model random effect sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \alpha_1 D_1 + \dots + \alpha_{26} D_{26} + \epsilon_i + \epsilon_{it}$$

3.4 Penentuan Metode Estimasi Regresi Data Panel

Pada analisis model regresi data panel mempunyai 3 model yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam pemilihan ketiganya dibutuhkan adanya kriteria pengujian agar mampu menentukan model yang paling tepat untuk mengestimasi regresi data panel.

Untuk memilih model yang tepat maka perlu pengujian yang harus dilakukan yaitu uji chow, uji hausman dan uji LM sebagai berikut:

3.4.1 Uji Chow

Uji chow berfungsi untuk menentukan model yang paling tepat antara Common Effect Model atau Fixed Effect Model dalam mengestimasi data panel. berikut ini hipotesisnya:

H_0 : Common Effect Model

H_1 : Fixed Effect Model

Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi maka menolak H_0 . Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi maka menerima H_0 dimana menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Jika H_0 diterima maka hasil uji terbaik adalah CEM sebaliknya jika H_0 ditolak maka hasil uji terbaik diantara keduanya adalah FEM dan perlu melanjutkan uji REM untuk menentukan hasil akhir model terbaik.

3.4.2 Uji Hausman

Uji hausman berfungsi untuk menentukan model yang tepat antara Fixed Effect Model atau Random Effect Model. Berikut ini hipotesisnya:

H_0 : Random Effect Model

H_1 : Fixed Effect Model

Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi maka menolak H_0 . Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi maka menerima H_0 dimana menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. H_0 diterima merepresentasikan bahwa model yang terbaik adalah REM sebaliknya jika hasil H_0 ditolak maka hasil terbaik yang diinterpretasikan adalah FEM.

3.4.3 Uji LM

Uji Langrange Multiplier merupakan pengujian yang berfungsi untuk menentukan model yang tepat antara Common Effect Model atau Random Effect Model dalam mengestimasi data panel. Berikut ini hipotesisnya:

H_0 : Common Effect Model

H_1 : Random Effect Model

Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi maka menolak H_0 . Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi maka menerima H_0 dimana menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Jika H_0 diterima maka hasil uji terbaik adalah CEM sebaliknya jika H_0 ditolak maka hasil uji terbaik diantara keduanya adalah REM. dan perlu melanjutkan uji FEM untuk menentukan hasil akhir model terbaik.

3.5 Pengujian Hipotesis

Berikut ini pengujian hipotesis yang akan dilakukan mempunyai berbagai uji sebagai berikut:

3.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini berfungsi untuk mengukur persentase dari total variasi dalam variabel dependen yang diterangkan oleh variabel independen. Apabila R^2 semakin tinggi maka memperjelas hubungan variabel dependen dan variabel independen. Namun apabila R^2 semakin rendah maka tidak memperjelas hubungan antara variabel dependen dan variabel independen.

3.5.2 Koefisien Regresi Bersama (Uji F)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 . Apabila F hitung lebih besar dari F tabel maka menerima hipotesis H_1 maka diartikan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara simultan. Ketika Menolak H_0 maka F hitung lebih kecil dari F tabel yang artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara simultan.. Hipotesis untuk uji F sebagai berikut :

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ yang artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$, yang artinya ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

3.5.3 Koefisien Regresi Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk menunjukkan apakah ada pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen secara parsial dengan menggunakan tingkat

signifikansi 5%. Apabila nilai P-value lebih kecil dari α maka terdapat pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Namun, jika nilai P-value lebih besar dari α maka tidak ada pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Adapun hipotesis uji T sebagai berikut :

1. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap tingkat kemiskinan

$H_0 : \beta = 0$, tidak ada pengaruh antara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap tingkat kemiskinan.

$H_1 : \beta > 0$, terdapat pengaruh positif antara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap tingkat kemiskinan.

2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan.

$H_0 : \beta = 0$, tidak ada pengaruh antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan.

$H_1 : \beta < 0$, terdapat pengaruh negatif antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan.

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tingkat kemiskinan.

$H_0 : \beta = 0$, tidak ada pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tingkat kemiskinan.

$H_1 : \beta < 0$, terdapat pengaruh negatif antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tingkat kemiskinan.

4. Pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan.

$H_0 : \beta = 0$, tidak ada pengaruh antara jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan.

$H_1 : \beta > 0$, terdapat pengaruh positif antara jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data dalam penelitian ini berisi data-data statistik. Adapun data statistik dalam penelitian ini terdiri dari mean, maksimum, minimum dan standar deviasi. Berikut ini olahan data statistik deskriptif yang dapat diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

Deskriptif	Tingkat Kemiskinan	UMK	IPM	PAD	Jumlah Penduduk
Mean	13,121	1613415	78,43933	480,6463	768768
Maksimum	20,3	2069530	87,18	972,05	1265429
Minimum	6,84	1235700	67,82	180,27	416261
Standar Deviasi	4,882615	224231,2	6,320251	237,9146	321419,4

Sumber : data diolah dari Eviews 12 (2023)

Dari Tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa terdapat 30 data penelitian. Pada tahun 2016-2021 tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara rata-rata yaitu 13,12% dengan tingkat kemiskinan terendah di Kota Yogyakarta pada tahun 2019 yang mana tingkat kemiskinan hanya sebesar 6,84%. Adapun tingkat kemiskinan yang tertinggi terdapat di Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2016 yaitu sebesar 20,3%, dengan standar deviasi sebesar 4,882615. Sementara itu, rata-rata upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 2016-2021 adalah Rp1.613.415. Upah minimum tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp2.069.530. Adapun daerah dengan upah minimum terendah terjadi di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp1.235.700, dengan standar deviasi sebesar 224231,2.

Sementara itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016-2021 secara rata rata yaitu sebesar 78,44% dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi sebesar 87,18% di Kota

Yogyakarta tahun 2021. Sementara itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah adalah di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2016, dengan standar deviasi sebesar 6,320251.

Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016-2021 secara rata-rata sebesar Rp480,6463 miliar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi terjadi di Kabupaten Sleman pada tahun 2019 sebesar Rp972,05 miliar. Adapun daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah adalah di Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2016 sebesar Rp180,27 miliar, dengan standar deviasi sebesar 237,9146.

Jumlah penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 2016-2021 secara rata rata sebanyak 768768 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi terjadi Kabupaten Sleman sebesar 1265429 jiwa pada tahun 2021. Adapun daerah dengan jumlah penduduk terendah adalah di Kabupaten Kulonprogo yang hanya sebesar 416261 jiwa yang terjadi pada tahun 2016, dengan standar deviasi sebesar 321419,4.

4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan

Adapun metode regresi pada data panel yaitu Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect. Untuk menentukan model yang tepat digunakan terdapat beberapa uji yaitu uji chow, uji LM, dan uji hausman.

4.2.1 Common Effect Model

Adapun hasil regresi data panel menggunakan model common effect ditampilkan pada Tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2 Hasil Estimasi Common Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	44.58995	7.614977	5.856328	0.0000
UMK	-5.34E-07	1.33E-06	-0.400598	0.6921
IPM	-0.330107	0.112054	-2.945964	0.0069
PAD	-0.012304	0.003347	-3.675995	0.0011
Jumlah Penduduk	1.56E-06	1.30E-06	1.202861	0.2403
R-squared	0.928555	Mean dependent var		13.12100
Adjusted R-squared	0.917123	S.D. dependent var		4.882615

S.E. of regression	1.405623	Akaike info criterion	3.669850
Sum squared resid	49.39439	Schwarz criterion	3.903383
Log likelihood	-50.04775	Hannan Quinn criter	3.744559
F-statistic	81.22930	Durbin-Watson stat	0.558674
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : data diolah dari Eviews 12 (2023)

4.2.2 Fixed Effect Model

Adapun hasil regresi data panel menggunakan model Fixed effect ditampilkan pada Tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3 Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	156.8788	28.07617	5.587615	0.0000
UMK	3.78E-06	1.56E-06	2.419357	0.0247
IPM	-2127480	0.374239	-5.684812	0.0000
PAD	0.001209	0.001875	0.644766	0.5261
Jumlah Penduduk	2.14E-05	9.32E-06	2.294905	0.0321
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.994565	Mean dependent var		13.12100
Adjusted R-squared	0.992494	S.D. dependent var		4.882615
S.E. of regression	0.423006	Akaike info criterion		1.360465
Sum squared resid	3.757618	Schwarz criterion		1.780824
Log likelihood	-11.40697	Hannan-Quinn criter		1.494941
F-statistic	480.3444	Durbin-Watson stat		2.309404
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : data diolah dari Eviews 12 (2023)

4.2.3 Random Effect Model

Adapun hasil regresi data panel menggunakan model Rndom effect ditampilkan pada Tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4 Hasil Estimasi Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	44.58995	2.291339	19.46021	0.0000
UMK	-5.34E-07	4.01E-07	-1.331161	0.1951
IPM	-0.330107	0.033721	-9.789254	0.0000
PAD	-0.012304	0.001007	-12.21510	0.0000
Jumlah Penduduk	1.56E-06	3.90E-07	3.997032	0.0005
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.000000	0.0000
Idiosyncratic random			0.423006	1.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.928555	Mean dependent var		13.12100
Adjusted R-squared	0.917123	S.D. dependent var		4.882615
S.E. of regression	1.405623	Sum squared resid		49.39439
F-statistic	81.22930	Durbin-Watson stat		0.558674
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.928555	Mean dependent var		13.12100
Sum squared resid	49.39439	Durbin-Watson stat		0.558674

Sumber : data diolah dari Eviews 12 (2023)

4.3 Pemilihan Model Terbaik

4.3.1 Uji Chow

Adapun hasil pemilihan uji regresi data panel dengan menggunakan model common effect dan fixed effect dengan menggunakan uji Chow ditampilkan dalam Tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.5 Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	63.761957	(4,21)	0.0000
Cross-section Chisquare	77.281551	4	0.0000

Sumber : data diolah dari Eviews 12 (2023)

Berdasarkan hasil data uji Chow di atas, bahwa diketahui nilai probabilitas *Cross-Section Chi-square* sebesar $0,0000 < \alpha$ (5%) maka menolak H_0 sehingga model yang lebih tepat digunakan yaitu Fixed Effect Model.

4.3.2 Uji Hausman

Adapun hasil pemilihan uji regresi data panel dengan menggunakan model fixed effect dan random effect dengan menggunakan uji Hausman ditampilkan dalam Tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	255.047829	4	0.0000

Sumber : data diolah Eviews 12 (2023)

Uji ini digunakan untuk menentukan model apa yang lebih baik digunakan antara fixed effect atau random effect. Berdasarkan hasil data uji Hausman di atas, bahwa diketahui nilai probabilitas *Cross-Section random* sebesar $0,0000 < \alpha$ (5%) maka menolak H_0 sehingga model yang lebih baik dipakai untuk penelitian ini yaitu Fixed Effect Model

4.4 Interpretasi Model Terbaik

Adapun model yang terbaik digunakan dalam regresi data panel yaitu menggunakan model fixed effect yang ditampilkan dalam Tabel 4.7 sebagai berikut :

Tabel 4.7 Regresi Data Panel Model Terbaik : Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	156.8788	28.07617	5.587615	0.0000
UMK	3.78E-06	1.56E-06	2.419357	0.0247
IPM	-2127480	0.374239	-5.684812	0.0000

PAD	0.001209	0.001875	0.644766	0.5261
Jumlah Penduduk	2.14E-05	9.32E-06	2.294905	0.0321

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.994565	Mean dependent var	13.12100
Adjusted R-squared	0.992494	S.D. dependent var	4.882615
S.E. of regression	0.423006	Akaike info criterion	1.360465
Sum squared resid	3.757618	Schwarz criterion	1.780824
Log likelihood	-11.40697	Hannan-Quinn criter	1.494941
F-statistic	480.3444	Durbin-Watson stat	2.309404
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : data diolah dari Eviews 12 (2023)

4.4.1 Uji Keباikan Regresi (R^2)

Berdasarkan data diatas didapatkan nilai koefisien R^2 sebesar 0,994565 yang artinya UMK, Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Asli Daerah, dan Jumlah Penduduk mampu menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen sebesar 99% sedangkan sisanya 1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.4.2 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Berdasarkan data diatas dapat diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% maka menolak H_0 . Maka UMK, Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Asli Daerah, dan Jumlah Penduduk secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

4.4.3 Uji statistik (Uji t)

Adapun hasil uji statistik (uji t) data panel sebagai berikut:

1. Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (X_1) mempunyai nilai koefisien sebesar 3.78E-06 dengan t-hitung sebesar 2.419357. Nilai probabilitasnya sebesar $0.0247 < \alpha 5\%$ maka variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota signifikan dan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Maka dengan ini apabila Upah Minimum Kabupaten/Kota naik 1% maka tingkat kemiskinan akan naik sebesar 3.78%.

2. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (X2) mempunyai nilai koefisien sebesar -2.127480 dengan t-hitung sebesar -5.684812. Nilai probabilitasnya sebesar $0.0000 < \alpha 5\%$ maka variabel Indeks Pembangunan Manusia signifikan dan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Maka dengan ini apabila Indeks Pembangunan Manusia naik 1% maka tingkat kemiskinan akan menurun sebanyak 2,12%.
3. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X3) mempunyai nilai koefisien sebesar 0.001209 dengan t-hitung sebesar 0.644766. Nilai probabilitasnya sebesar $0,5261 > 5\%$ maka variabel Pendapatan Asli Daerah tidak signifikan dan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.
4. Variabel Jumlah Penduduk (X4) mempunyai nilai koefisien sebesar 2.14E05 dengan t-hitung sebesar 2.294905. Nilai probabilitasnya sebesar $0,0321 < \alpha 5\%$ maka variabel jumlah penduduk signifikan dan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Maka dengan ini apabila jumlah penduduk naik 1% maka tingkat kemiskinan akan naik sebanyak 2,14%.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil regresi data panel maka didapatkan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016-2021. Adapun hasil koefisien yang didapatkan dari upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021 memiliki angka positif sehingga bisa diartikan bahwa semakin tingginya upah minimum kabupaten/kota maka tingkat kemiskinan akan semakin meningkat.

Hal ini dimungkinkan karena fenomena yang memperlihatkan bahwa peningkatan pada upah minimum cenderung diikuti oleh terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PHK pada gilirannya akan menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran. Hal ini tentunya akan meningkatkan angka kemiskinan. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian Islami & Anis (2019) yang menyatakan

bahwa peningkatan pada upah minimum tidak selalu diiringi oleh penurunan angka kemiskinan.

4.5.2 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil regresi data panel (Fixed Effect) maka didapatkan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016-2021. Adapun hasil koefisien yang didapatkan dari upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016-2021 memiliki angka negatif sehingga bisa diartikan bahwa semakin tingginya indeks pembangunan manusia maka tingkat kemiskinan akan semakin menurun.

Hal ini dimungkinkan karena investasi yang dilakukan pada pendidikan maka akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adanya peningkatan pada pendidikan maka akan mendorong produktivitas kerja sehingga perusahaan akan memberikan gaji yang lebih tinggi yang tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut hingga akhirnya mengurangi angka kemiskinan. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian Vania Grace Sianturi et al., (2021) yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

4.5.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil regresi data panel (Fixed Effect) maka didapatkan tidak ada pengaruh antara variabel pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016-2021.

Hal ini dimungkinkan karena penggunaan pendapatan asli daerah belum menyentuh program-program pengentasan kemiskinan. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian (Kadafi & Murtala, 2020) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Suatu daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

4.5.4 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil regresi data panel (Fixed Effect) maka didapatkan pengaruh yang signifikan antara variabel jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016-2021. Adapun hasil koefisien yang didapatkan dari upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta tahun 2016-2021 memiliki angka positif sehingga bisa diartikan bahwa semakin tingginya jumlah penduduk maka tingkat kemiskinan akan semakin meningkat.

Hal ini dimungkinkan karena Hal ini dimungkinkan karena penambahan penduduk menyebabkan tidak mampu terserap di pasar tenaga kerja sehingga terjadi pengangguran. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian Wahyu Azizah E et al., (2018) yang menyatakan bahwa jika jumlah penduduk meningkat maka kemiskinan juga akan meningkat.



BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Simpulan

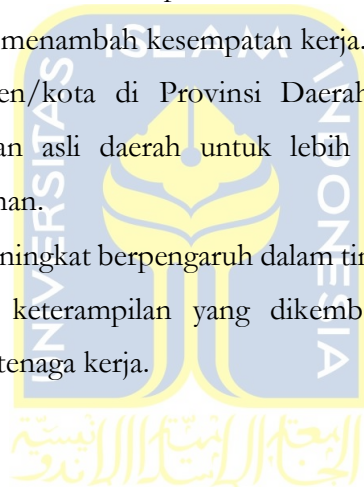
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, mengacu kepada hasil estimasi dan pembahasan dengan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2021”, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Upah minimum kabupaten/kota berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini menjelaskan bahwa peningkatan upah minimum kabupaten/kota mengakibatkan peningkatan tingkat kemiskinan. Hal ini dimungkinkan karena kenaikan upah minimum kabupaten/kota diikuti pengurangan tenaga kerja.
2. Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini menjelaskan bahwa peningkatan indeks pembangunan manusia mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini dimungkinkan karena adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan serta kesempatan kerja yang memadai.
3. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini menjelaskan bahwa peningkatan atau penurunan pendapatan asli daerah tidak berkontribusi dalam peningkatan atau penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini dimungkinkan karena penggunaan pendapatan asli daerah belum menyentuh program-program pengentasan kemiskinan.
4. Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penduduk mendorong meningkatnya tingkat kemiskinan. Hal ini dimungkinkan karena penambahan penduduk menyebabkan tidak mampu terserap di pasar tenaga kerja sehingga terjadi pengangguran dan diikuti naiknya tingkat kemiskinan.
5. Secara simultan menjelaskan bahwa angka pada variabel UMK, IPM, dan jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan PAD tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

5.2 Implikasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, mengacu kepada hasil estimasi dan pembahasan dengan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2021”, menghasilkan implikasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus lebih bijaksana dalam menentukan Upah Minimum Kabupaten/Kota.
2. Indeks pembangunan manusia berdampak dalam penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan dapat dilakukan dengan meningkatkan indeks pembangunan manusia yaitu dengan lebih mempermudah akses dan fasilitas pendidikan serta kesehatan, kemudian menambah kesempatan kerja.
3. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengelola pendapatan asli daerah untuk lebih fokus pada program-program pengentasan kemiskinan.
4. Jumlah penduduk meningkat berpengaruh dalam tingkat kemiskinan sehingga perlu adanya peningkatan keterampilan yang dikembangkan agar penduduk dapat terserap dalam pasar tenaga kerja.



DAFTAR PUSTAKA

- Amami, R., & Asmara, K. (2022). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ekobistek*, 11, 48–54. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i2.297>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Penduduk*. <https://www.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Indeks Pembangunan Manusia*. <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>
- Cahyani, F. N., & Muljaningsih, S. (2022). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk , Tingkat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 1–10.
- Chairunnisa, N. M., & Qintharah, Y. N. (2022). Pengaruh Kesehatan, Tingkat Pendidikan, dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 7(1), 147–161. <https://doi.org/10.51289/peta.v7i1.530>
- Daniel, P. A., Soleh, A., Kurniawan, H., & Firmansyah, D. (2021). DETERMINAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAMBI. *Jurnal Development*, 9(2), 155–168.
- Islami, N., & Anis, A. (2019). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 939. <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i3.7721>
- Kadafi, M., & Murtala, M. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh Periode 2010-2017. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(2), 23. <https://doi.org/10.29103/jeru.v3i2.3203>
- Kawulur, S., Kolenangan, A. M., & C. Wauran, P. (2019). Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Desa dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan di 11 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(03), 107–117.
- Kurniawan, A. (2018). *Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat* [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9581/FULL> SKRIPSI

ACEP KURNIAWAN FE UII.pdf?sequence=2&isAllowed=y

- Lestari, D., Nainggolan, P., & Damanik, D. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Upah Minimum Kabupaten / Kota Terhadap Inflasi Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(1), 27–36. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v4i1.334>
- Madina, A. T. (2022). *Kemiskinan Ekstrem di DIY Naik 2% Imbas Pandemi COVID-19, Apa Saja Upaya Pemda?* Kumparan.Com. <https://kumparan.com/kumparannews/kemiskinan-ekstrem-di-diy-naik-2-imbis-pandemi-covid-19-apa-saja-upaya-pemda-1yM76FsTbBj>
- Manek, M., & Badrudin, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Telaah Bisnis*, 17(2), 81–98. <https://doi.org/10.35917/tb.v17i2.49>
- Nurjihadi, M., & Dharmawan, A. H. (2016). Lingkaran Setan Kemiskinan Dalam Masyarakat Pedesaan, Studi Kasus Petani Tembakau di Kawasan Pedesaan Pulau Lombok. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(2), 120–127. <https://doi.org/https://doi.org/10.22500/sodality.v4i2.13372>
- PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN. (2018). *PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG UPAH MINIMUM*.
- Pratiwi, P. T. (2022). *ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2014-2020* [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/39900/15313128.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia. *Esensi*, 4(2), 45–53. <https://doi.org/10.15408/ess.v4i2.1966>
- Rany, A. P. (2021). Pengaruh Pad , Dau , Dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus 38 Kab / Kota Di Prov Jawa Timur Periode 2010-2019). *Fakultas Ekonomi Bisnis*, 175020100111037.
- Salsabilla, A., Juliannisa, I. A., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Faktor-Faktor Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ikra-Ith*

Ekonomika, 5(2), 96–105.

- Sayifullah, S., & Gandasari, T. R. (2016). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(2), 236–255. <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i2.4345>
- Suhandi, N., Putri, E. A. K., & Agnisa, S. (2018). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kemiskinan Menggunakan Metode Regresi Linear di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Informatika Global*, 9(2), 77–82. <https://doi.org/10.36982/jig.v9i2.543>
- Todaro. (2011). *Pembangunan Ekonomi*.
- Undang-Undang RI. (2009). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH*.
- UNDP. (1990). *Human development report 1990*.
- Vania Grace Sianturi, M. Syafii, & Ahmad Albar Tanjung. (2021). Analisis Determinasi Kemiskinan di Indonesia Studi Kasus (2016-2019). *Jurnal Samudra Ekonomika*, 5(2), 125–133. <https://doi.org/10.33059/jse.v5i2.4270>
- Wahyu Azizah E, Sudarti, & dan Kusuma, H. (2018). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2, 167–180.
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya*, Ekonosia. In *Yogyakarta: Penerbit YKPN*.
- Widarjono, A. (2016). *Ekonomika Pengantar dan Aplikasi Edisi 4*. In *Yogyakarta: UPP STIM YKPN*.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Tingkat Kemiskinan, Upah Minimum, IPM, PAD, Jumlah Penduduk

Kabupaten/Kota	Tahun	Tingkat Kemiskinan (Y)	Upah Minimum (X1)	IPM (X2)	PAD (X3)	Jumlah Penduduk (X4)
Kulonprogo	2016	20,3	1268870	72,38	180,27	416261
Kulonprogo	2017	20,03	1373600	73,23	249,69	421500
Kulonprogo	2018	18,3	1493250	73,76	211,05	426767
Kulonprogo	2019	17,39	1613200	74,44	237,88	432058
Kulonprogo	2020	18,01	1750500	74,46	254,42	437373
Kulonprogo	2021	18,38	1770000	74,71	307,15	442724
Bantul	2016	14,55	1297700	78,42	404,45	982201
Bantul	2017	14,07	1404760	78,67	494,18	995639
Bantul	2018	13,43	1572150	79,45	462,65	1009171
Bantul	2019	12,92	1649800	80,01	505,93	1022788
Bantul	2020	13,5	1790500	80,01	479,61	1036489
Bantul	2021	14,04	1805000	80,28	491,67	1050308
Gunungkidul	2016	19,34	1235700	67,82	206,28	722205
Gunungkidul	2017	18,65	1337650	68,73	271,37	731170
Gunungkidul	2018	17,12	1454200	69,24	226,98	740181
Gunungkidul	2019	16,61	1571000	69,96	254,81	749229
Gunungkidul	2020	17,07	1705000	69,98	228,21	758316
Gunungkidul	2021	17,69	1842460	70,16	236,37	767464
Sleman	2016	8,21	1338000	82,15	717,15	1180908
Sleman	2017	8,13	1448385	82,85	825,64	1197563
Sleman	2018	7,65	1574550	83,42	894,27	1214346
Sleman	2019	7,41	1701000	83,85	972,05	1231246
Sleman	2020	8,12	1846000	83,84	788,25	1248258
Sleman	2021	8,64	1903500	84	803,68	1265429
Yogyakarta	2016	7,7	1452400	85,32	540,5	416958
Yogyakarta	2017	7,64	1572200	85,49	657,05	422363
Yogyakarta	2018	6,98	1709150	86,11	667,49	427801
Yogyakarta	2019	6,84	1848400	86,65	689,05	433267
Yogyakarta	2020	7,27	2004000	86,61	563,17	438761
Yogyakarta	2021	7,64	2069530	87,18	598,12	444295

Lampiran 2

Common Effect Model

Dependent Variable: TINGKAT_KEMISKINAN__Y_

Method: Panel Least Squares

Date: 01/11/23 Time: 13:12

Sample: 2016 2021

Periods included: 6

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	44.58995	7.613977	5.856328	0.0000
UPAH_MINIMUM__X1_	-5.34E-07	1.33E-06	-0.400598	0.6921
IPM__X2_	-0.330107	0.112054	-2.945964	0.0069
PAD__X3_	-0.012304	0.003347	-3.675995	0.0011
JUMLAH_PENDUDUK__X4_	1.56E-06	1.30E-06	1.202861	0.2403
R-squared	0.928555	Mean dependent var	13.12100	
Adjusted R-squared	0.917123	S.D. dependent var	4.882615	
S.E. of regression	1.405623	Akaike info criterion	3.669850	
Sum squared resid	49.39439	Schwarz criterion	3.903383	
Log likelihood	-50.04775	Hannan-Quinn criter.	3.744559	
F-statistic	81.22930	Durbin-Watson stat	0.558674	
Prob(F-statistic)	0.000000			



Lampiran 3

Fixed Effect Model

Dependent Variable: TINGKAT_KEMISKINAN__Y_

Method: Panel Least Squares

Date: 01/11/23 Time: 13:13

Sample: 2016 2021

Periods included: 6

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	156.8788	28.07617	5.587615	0.0000
UPAH_MINIMUM__X1_	3.78E-06	1.56E-06	2.419357	0.0247
IPM__X2_	-2.127480	0.374239	-5.684812	0.0000
PAD__X3_	0.001209	0.001875	0.644766	0.5261
JUMLAH_PENDUDUK__X4_	2.14E-05	9.32E-06	2.294905	0.0321

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.994565	Mean dependent var	13.12100
Adjusted R-squared	0.992494	S.D. dependent var	4.882615
S.E. of regression	0.423006	Akaike info criterion	1.360465
Sum squared resid	3.757618	Schwarz criterion	1.780824
Log likelihood	-11.40697	Hannan-Quinn criter.	1.494941
F-statistic	480.3444	Durbin-Watson stat	2.309404
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 4

Random Effect Model

Dependent Variable: TINGKAT_KEMISKINAN__Y_
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 01/11/23 Time: 13:14
 Sample: 2016 2021
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 30
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	44.58995	2.291339	19.46021	0.0000
UPAH_MINIMUM__X1__	-5.34E-07	4.01E-07	-1.331161	0.1951
IPM__X2__	-0.330107	0.033721	-9.789254	0.0000
PAD__X3__	-0.012304	0.001007	-12.21510	0.0000
JUMLAH_PENDUDUK__X4__	1.56E-06	3.90E-07	3.997032	0.0005

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.000000	0.0000
Idiosyncratic random		0.423006	1.0000

Weighted Statistics			
R-squared	0.928555	Mean dependent var	13.12100
Adjusted R-squared	0.917123	S.D. dependent var	4.882615
S.E. of regression	1.405623	Sum squared resid	49.39439
F-statistic	81.22930	Durbin-Watson stat	0.558674
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.928555	Mean dependent var	13.12100
Sum squared resid	49.39439	Durbin-Watson stat	0.558674

Lampiran 5

Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	63.761957	(4,21)	0.0000
Cross-section Chi-square	77.281551	4	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: TINGKAT_KEMISKINAN__Y_
Method: Panel Least Squares
Date: 01/11/23 Time: 13:13
Sample: 2016 2021
Periods included: 6
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	44.58995	7.613977	5.856328	0.0000
UPAH_MINIMUM__X1_	-5.34E-07	1.33E-06	-0.400598	0.6921
IPM__X2_	-0.330107	0.112054	-2.945964	0.0069
PAD__X3_	-0.012304	0.003347	-3.675995	0.0011
JUMLAH_PENDUDUK__X4_	1.56E-06	1.30E-06	1.202861	0.2403
R-squared	0.928555	Mean dependent var	13.12100	
Adjusted R-squared	0.917123	S.D. dependent var	4.882615	
S.E. of regression	1.405623	Akaike info criterion	3.669850	
Sum squared resid	49.39439	Schwarz criterion	3.903383	
Log likelihood	-50.04775	Hannan-Quinn criter.	3.744559	
F-statistic	81.22930	Durbin-Watson stat	0.558674	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 6

Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	255.047829	4	0.0000

** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero.

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
UPAH_MINIMUM_X1_	0.000004	-0.000001	0.000000	0.0043
IPM_X2_	-2.127480	-0.330107	0.138918	0.0000
PAD_X3_	0.001209	-0.012304	0.000003	0.0000
JUMLAH_PENDUDUK_X4_	0.000021	0.000002	0.000000	0.0332

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: TINGKAT_KEMISKINAN_Y_

Method: Panel Least Squares

Date: 01/11/23 Time: 13:14

Sample: 2016 2021

Periods included: 6

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	156.8788	28.07617	5.587615	0.0000
UPAH_MINIMUM_X1_	3.78E-06	1.56E-06	2.419357	0.0247
IPM_X2_	-2.127480	0.374239	-5.684812	0.0000
PAD_X3_	0.001209	0.001875	0.644766	0.5261
JUMLAH_PENDUDUK_X4_	2.14E-05	9.32E-06	2.294905	0.0321

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.994565	Mean dependent var	13.12100
Adjusted R-squared	0.992494	S.D. dependent var	4.882615
S.E. of regression	0.423006	Akaike info criterion	1.360465
Sum squared resid	3.757618	Schwarz criterion	1.780824
Log likelihood	-11.40697	Hannan-Quinn criter.	1.494941
F-statistic	480.3444	Durbin-Watson stat	2.309404
Prob(F-statistic)	0.000000		